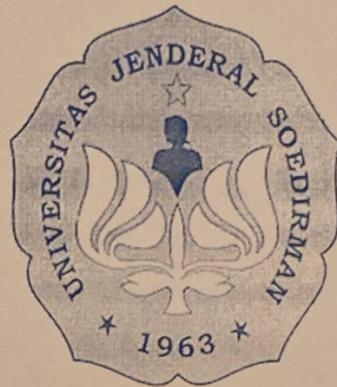


LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROYEK-PROYEK STRATEGIS NASIONAL BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BATANG



Kerjasama:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Jenderal Soedirman

Dengan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO

2018

LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROYEK-PROYEK STRATEGIS NASIONAL BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BATANG



**Kerjasama:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Jenderal Soedirman**

Dengan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah: (1) ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang; (2) pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air; (3) subyek dan obyek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia, dan menghasilkan manusia

dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula; dan (4) pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional dari berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga menunjang terselenggaranya pembangunan di suatu wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan

pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

Pembangunan nasional di bidang infrastruktur dilaksanakan di berbagai wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan partisipasi masyarakat, sehingga selain berdampak pada aspek ekonomi, keberadaan infrastruktur juga berdampak secara sosial terhadap masyarakat di suatu wilayah. Seperti pembangunan infrastruktur yang sifatnya nasional dan dilaksanakan di Kabupaten Batang terdapat beberapa proyek antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan jalan tol yang menghubungkan antara Kabupaten Brebes dengan Semarang.

Pembangkit listrik merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Salah satu pembangkit listrik yang dibangun adalah PLTU Batang atau yang juga disebut *Central Java Power Plant*. PLTU ini merupakan salah satu PLTU terbesar di Asia Tenggara yang menggunakan bahan bakar batubara. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 226 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Batang. Kapasitas listrik yang dihasilkan juga sangat besar yakni mencapai 2 x 1000 MW. Kapasitas tersebut merupakan bagian dari rencana besar untuk menambah 35.000 megawatt listrik ke wilayah-wilayah Indonesia. Proyek ini membutuhkan dana sebesar US\$ 4.2 miliar yang didapat dari *Japan Bank for International Cooperation* dan sindikat bank internasional yang memberikan dukungan finansial. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan ini kurang lebih 5 tahun yang dimulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai tahun 2020. PLTU ini akan menambah pasokan listrik di wilayah Jawa-Bali sebesar 5,7 %, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik 13 juta penduduk Jawa Tengah. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan listrik industri, sehingga operasional industri akan lancar.

PT Bhimasena Power Indonesia selaku pemrakarsa dan pengelola PLTU ini meraih penghargaan *3G Social Empowerment Award* pada ajang *Global Good Governance Award 2018*. Penghargaan tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial pada masyarakat

terdampak (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Selain itu perusahaan ini juga dianggap tepat sasaran karena dilaksanakan sesuai dengan aspek lingkungan dan dampak sosial pada masyarakat (<https://maria.co.id/fakta-tentang-proyek-pltu-batang/>). Terdapat 37 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di wilayah Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis yang mendapatkan program pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan, peralatan produksi, dan pengadaan modal usaha.

Pembangunan PLTU Batang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan pasokan energi saja, tetapi juga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan ini telah melalui proses Amdal dan telah memperhitungkan dampak sosial-ekonomi. Kendati demikian proses pembangunan PLTU ini diiringi dengan gerakan sosial yang cukup dinamis terutama pada saat pembebasan lahan. Hal tersebut tentunya menyimpan potensi konflik horizontal jika tidak diikuti dengan pemberdayaan yang berkelanjutan. Begitu juga dengan berbagai temuan dari beberapa pihak seperti *Greenpeace*, tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. *Greenpeace* mensinyalir bahwa PLTU tersebut akan mengeluarkan 10,8 juta ton karbon dan 226 kg merkuri setiap tahunnya. Pembangkit listrik yang berbasis batubara mempunyai risiko kandungan emisi karbon yang besar.

Proyek nasional lainnya yang berada di Kabupaten Batang adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 806 kilometer. Tol ini menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Jalan tol yang menghubungkan Pemalang-Batang dan Batang-Semarang merupakan prioritas pertama.

Jalan tol merupakan jalan khusus bagi transportasi tertentu yang dapat melaluinya. Jalan tol itu sendiri memiliki kriteria yaitu dikhususkan bagi kendaraan atau transportasi yang memiliki sumbu lebih dari dua atau tidak dapat kurang dari dua. Misalnya mobil, truk, bus, dan sebagainya asalkan memenuhi kriteria khusus tersebut. Banyak sekali manfaat jalan tol:

1. Melancarkan lalu lintas. Sesuai dengan sebutannya jalan bebas hambatan, jalan tol memiliki fungsi khusus dalam memperlancar arus

- lalu lintas. Berupaya memenuhi jalan khusus yang nantinya akan membantu para pengendara untuk lebih mudah dalam perjalanan.
2. Mempersingkat waktu. Jalan tol juga memiliki fungsi lanjutan yaitu mempersingkat waktu karena jarak tempuh yang harus dilalui pengendara semakin singkat dengan jalan tanpa hambatan yang akan semakin mempercepat waktu tempuh tersebut.
 3. Memajukan daerah berkembang. Untuk daerah berkembang, memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat serta para pendatang untuk ikut serta memajukan.
 4. Meningkatkan kualitas ekonomi. Keberadaan jalan tol akan membantu menggerakkan roda perekonomian, sehingga kualitas perekonomian wilayah yang terdampak dan bahkan perekonomian nasional.
 5. Meningkatkan distribusi barang dan jasa. Jalan tol akan membantu pemenuhan barang dan jasa sebagai wujud pelayanan publik. Jalan tol akan membantu dan memperlancar pemenuhan barang dan jasa, sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi.
 6. Pemerataan pembangunan. Pembangunan jalan tol akan membantu berkembangnya suatu wilayah bahkan wilayah terpencil pun, sehingga hasil-hasil pembangunan akan terdistribusi secara merata.
 7. Meningkatkan keadilan. Manfaat kelanjutan dari pemerataan pembangunan adalah keadilan. Semua masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya.
 8. Meringankan beban pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengolah potensi daerah akan semakin terbantu dengan adanya jalan tol.
 9. Hemat biaya operasional kendaraan. Pengguna jalan akan terbantu dalam menghemat biaya operasional karena waktu tempuh yang harus dilalui jauh lebih sedikit.
 10. Meskipun investasi pemerintah membangun jalan tol sangat besar, tetapi pada akhirnya pemerintah akan menerima pengembalian investasi tersebut dari pendapatan jalan tol itu sendiri.
 11. Memperluas lapangan kerja. Jalan tol membutuhkan banyak tenaga kerja baik untuk operasional jalan tol itu sendiri maupun untuk rest area-nya.

12. Penghubung antar daerah. Jalan tol dibangun memang untuk menghubungkan antardaerah, bahkan dengan daerah yang terisolir sekali pun.
13. Menarik para investor untuk berinvestasi. Jalan tol akan mempermudah para investor untuk mengembangkan potensi di berbagai wilayah.
14. Penyeimbang laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus berjalan mengakibatkan semakin banyaknya jumlah kendaraan. Jika tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tol, maka kemacetan lalu lintas akan semakin parah.
15. Upaya mengatasi permasalahan sosial. Hal ini terutama terkait dengan mobilitas sosial. Jalan tol akan sangat membantu mobilitas sosial menjadi lebih stabil.
16. Mengurangi macet. Tujuan utama jalan tol yang sifatnya pragmatis adalah menguraikan kemacetan lalu lintas yang terjadi pada jalan reguler.
17. Jalur alternatif. Jalan tol merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih masyarakat dalam menempuh perjalanan.
18. Meningkatkan keamanan dunia transportasi. Jalan tol diharapkan akan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Banyak sekali manfaat dari jalan tol yang dapat dirasakan oleh masyarakat, namun demikian jika dikaitkan dengan investasi masyarakat yang sudah terlanjur dilaksanakan di jalur jalan reguler, maka kemungkinan besar akan berdampak pada lesunya usaha tersebut. Semakin banyaknya pengendara yang melewati jalan tol, berarti mengurangi jumlah pengendara yang melalui jalan reguler. Sementara itu usaha kuliner, souvenir dan penginapan yang sudah terlanjur banyak dilakukan oleh masyarakat Batang tentunya akan terganggu perkembangannya. Jika hal ini terjadi maka pada gilirannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dari pajak hotel dan restoran akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka meneliti dampak proyek-proyek strategis nasional di Kabupaten Batang terhadap perekonomian dan aspek sosial masyarakat Batang menjadi sangat penting. Kedua proyek tersebut sesungguhnya jika dilihat dari segi waktu, masih termasuk proyek yang relatif

baru, namun demikian jika penelitian dilakukan saat ini, maka dampak-dampak yang tidak diharapkan akan dapat diantisipasi sedini mungkin.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan PLTU bagi masyarakat Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan jalan tol bagi masyarakat Kabupaten Batang ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi pembangunan PLTU bagi masyarakat Kabupaten Batang.
2. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi pembangunan jalan tol bagi masyarakat Kabupaten Batang.

4. OUTPUT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka output yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Deskripsi mendalam dampak sosial dan ekonomi pembangunan PLTU bagi masyarakat Kabupaten Batang
2. Deskripsi mendalam dampak sosial dan ekonomi pembangunan PLTU bagi masyarakat Kabupaten Batang

5. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat yang dapat diharapkan antara lain:

1. Membantu Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batang menghindari dampak sosial dan ekonomi yang tidak diharapkan dari pembangunan PLTU.

2. **Membantu Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batang menghindari dampak sosial dan ekonomi yang tidak diharapkan dari pembangunan jalan tol.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. KONSEP PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional serta tingkat global internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap pemahaman, tahap ini disebut: (1) secara politik demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial terjadi peran serta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi mekanisme pasar berperan (*market work-mechanism*); (4) secara

hukum, berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik, pembangunan dikelola secara baik. Sementara itu pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*).

Siagian (1994) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukimo, 1995). Dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Terkait dengan model pembangunan, sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant*

development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*eco development*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethno development*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan yaitu *economic growth*, *basic needs*, dan *people centered*.

Economic growth merupakan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi antara lain melalui: (1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (2) peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas; (3) kemajuan teknologi yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

Basic needs juga disebut sebagai model pembangunan kebutuhan dasar (kesejahteraan). Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan mendasar masyarakat.

People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia). Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah *empowering* (pemberdayaan). Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun kiranya pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan adalah masalah pendidikan, peningkatan standar kesehatan, nutrisi, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Namun patut dicatat bahwa apa yang disebut sebagai "kehidupan yang lebih baik" itu sangat relatif, harus melibatkan nilai (*values*) dan pengukuran nilai (*value judgement*). Dengan demikian dalam terminologi pembangunan terdapat pengukuran nilai tentang apa yang baik (pembangunan) dan apa yang buruk (keterbelakangan). Akan tetapi perlu direnungkan pemaknaan "pembangunan" itu sendiri tidak sama bagi setiap orang.

2. TEORI PEMBANGUNAN

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi menjadi dua paradigma besar yakni modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial serta teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under development*), teori ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Teori modernisasi memiliki beberapa asumsi dasar:

1. Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikkan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat negara-negara berkembang.
2. Berangkat dari modernisasi tersebut, maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern disamping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan

pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal (*traditional life*).

3. Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan dimana saja.

Oleh karena itu dalam proses modernisasi terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan. Para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat tradisional.

Beberapa teori modernisasi antara lain:

1. **Teori Harrod Domar tentang tabungan dan investasi** menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi/penanaman modal. Pembangunan membutuhkan investasi sebagai pendorong produksi. Dari produktivitas ini akan menyerap tenaga kerja yang membentuk regulasi ketenagakerjaan sekaligus menyumbang negara dalam bentuk pajak. Persoalan kegagalan, teori ini berlangsung karena kejadian *capital flight* yakni larinya modal ke luar negeri. *Capital flight* ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal: (a) tuntutan buruh yang dianggap menghambat produktivitas dan surplus *value investor*; (b) perizinan; dan (c) pungutan liar. Dengan demikian untuk memecahkan persoalan keterbelakangan pada negara-negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal atau utang luar negeri.
2. **Human Capital Theory.** David McClelland menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Keterampilan dan pengetahuan yang tinggi berarti mendorong tingginya tingkat pendapatan.
3. **Teori Weber tentang peran agama khususnya Protestan** dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran ini. Apabila nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan pada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana. Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan oleh Calvin, mengatakan bahwa seseorang setelah mati akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi manusia tidak mengetahui sehingga mereka menjadi tidak tenang, cemas karena ketidakjelasan nasibnya. Indikatornya dapat dilihat pada saat hidup di dunia jika: (a) seseorang sukses/berhasil di dunia tanda-tanda masuk surga; (b) jika seseorang gagal di dunia tanda-tanda masuk neraka. Dengan indikator tersebut maka pengikutnya belajar/berjuang untuk mencapai indikator masuk surga.

4. **Rostow tentang lima tahap pembangunan** menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Lima tahap pembangunan tersebut: (1) masyarakat tradisional; (2) pra kondisi untuk lepas landas; (3) lepas landas; (4) bergerak ke kedewasaan; dan (5) zaman konsumsi masal yang tinggi.
5. **Bert F. Hoselitz tentang faktor-faktor non ekonomi.** Membahas faktor-faktor non ekonomi yang ditinggalkan oleh Rostow yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai pihak terutama dari kelompok pendukung teori dependensi sehingga timbul paradigma baru yang dikenal sebagai teori modernisasi baru (Suwarsono, 1991)
6. **Alex Inkeles & David H. Smith tentang manusia modern** menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini

lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun.

Teori Dependensi atau teori ketergantungan lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk membuat suatu teori pembangunan yang baru, yang terus saja memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai musang berbulu domba dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung. Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan). Secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (*the development of under development*). Siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ?

Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.

Asumsi dasar dari teori dependensi mencakup: (1) keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga; (2) ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar; (3) permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara-negara dunia ketiga ke negara maju; (4) situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono, 1991).

Teori dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilontarkan mungkin lebih banyak daari sanggahan terhadap teori modernisasi (Suwarsono, 1991). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur di kebanyakan negara berkembang. Menurut perspektif dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahana ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran (Suwarsono, 1991).

Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal yakni Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teori-teori Marxis tentang imperialisme dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari teori ketergantungan:

1. Paul Prebisch: Industri Substitusi Impor

Paul Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal, yang menjadi sekretaris eksekutif sebuah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1948 di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan nama ECLA (*Economic Commission for Latin America*). Sebelumnya antara tahun 1935 sampai 1943 Prebisch adalah Presiden Direktur Bank Sentral

Argentina. Oleh karena itu, dia banyak bergumul dengan dampak masa depresi besar tahun 1930-an. Pada tahun 1950 Prebisch menjadi Direktur ECLA. Perhatiannya tertuju pada persoalan yang diuraikan di atas, mengapa negara-negara yang melakukan spesialisasi di bidang industri menjadi negara-negara kaya, sedangkan mereka yang memilih bidang pertanian tetap saja miskin ? Menurut pendapat Prebisch yang paling terkenal: negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi, bila mau membangun dirinya. Industrialisasi ini dimulai dengan industri substitusi impor. Barang-barang industri yang tadinya diimpor, harus diproduksi di dalam negeri. Tentunya ini berarti bahan industri-industri yang masih bayi ini harus dilindungi dari industri-industri besar yang sudah sangat kuat di negara-negara maju. Oleh karena itu pemerintah perlu melindungi industri-industri bayi ini melalui kebijakan proteksi. Baru setelah industri bayi ini menjadi dewasa dan sanggup bersaing dengan industri-industri yang ada di negara pusat, proteksi ini ditarik kembali. Ekspor barang-barang primer masih tetap penting peranannya, karena dari devisa yang dihasilkannya dapat diimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin industri, sementara itu diusahakan terus supaya barang-barang modal ini dikemudian hari bisa dibuat sendiri oleh negara-negara ini. Peran pemerintah dalam proses industrialisasi, sudah diuraikan di atas menjadi besar. Bagi Prebisch, campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangan.

2. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme.

Pemikiran tentang imperialisme dan kolonialisme bergumul dengan pertanyaan mengapa bangsa-bangsa di Eropa melakukan ekspansi keluar dan menguasai bangsa-bangsa lainnya, baik secara politis maupun secara ekonomis ? Apa yang menjadi dorongan utamanya ? Ada tiga kelompok teori yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini yakni kelompok teori yang menekankan:

- a. Idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
- b. Kehausan manusia terhadap kekuasaan untuk kebesaran pribadi maupun kebesaran masyarakat dan negaranya.
- c. Pada keserakahan manusia, yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan yang didorong oleh kepentingan ekonomi.

Ketiga kelompok teori ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok teori God (Tuhan yang melambangkan keinginan manusia untuk menyebarkan agama untuk menciptakan dunia yang lebih baik), Teori Glory (kebesaran, yang melambangkan kehausan manusia akan kekuasaan), dan teori Gold (emas, yang melambangkan keserakahan manusia terhadap harta).

Teori God, pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi utama dari orang-orang Eropa untuk mengarungi samudra dan berulangi di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama. Mereka ingin membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar, yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka, karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di benak orang-orang Eropa ketika itu. Oleh karena itu dalam kapal-kapal yang mengarungi samudra di benua Amerika, Afrika dan Asia, disamping membawa tentara (yang katanya untuk melindungi diri bila diserang), mereka juga membawa para pendeta.

Teori Glory, menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialisme dan kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Salah satu pencetus teori ini yang terkenal adalah Joseph A. Schumpeter. Dia membantah bahwa imperialisme dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberikan bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialis dan kolonialis. Bagi Schumpeter, kapitalisme bertentangan dengan imperialisme. Kapitalisme

dibangun atas dasar rasionalitas, sedangkan imperialisme tidak. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk berperang, untuk membuktikan keperkasaan diri. Hal-hal seperti ini jauh dari pikiran seorang kapitalis yang rasional. Karena itulah setiap perang selalu secara seksama diberi alasan sebagai perang untuk mempertahankan diri oleh semua pemerintah yang terlibat, dan oleh semua partai politik dalam pernyataan resmi mereka. Ini berarti bahwa pernyataan perang dengan alasan lain merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima secara politis (Budiman, 1996).

Teori Gold, yakni teori yang menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Salah satu bukti klasik tentang imperialisme yang termasuk dalam kategori ini ditulis oleh John A. Hobson, dengan judul "*Imperialism: A Study*". Dimulai dengan buku ini, persiapan imperialisme kemudian menjadi bahan diskusi. Dalam karya yang lain, Hobson pada intinya menjelaskan, imperialisme terjadi karena dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Imperialisme ada hubungannya dengan kapitalisme. Pada suatu saat, perkembangan kapitalisme mencapai sebuah keadaan di mana produktivitas menjadi semakin meningkat, tetapi pasar di dalam negeri terbatas. Buruh yang dibayar dengan upah yang rendah tidak bisa membeli kelebihan produksi yang ada. Oleh karena itu, hasil-hasil produksi ini harus dicarikan pasar di luar negeri. Pada titik ini juga, investasi di dalam negeri menjadi kurang menguntungkan karena pasar dalam negeri sudah jenuh. Maka, modal yang ada diekspor keluar. Modal diinvestasikan di negara-negara lain yang pasarnya masih belum jenuh. Maka, modal yang ada diekspor keluar. Modal diinvestasikan di negara-negara lain yang pasarnya masih belum jenuh. Tampaknya yang banyak dianut adalah teori imperialisme jenis ketiga, yakni yang menjelaskan gejala ini dari motivasi ekonomi. Teori Marxis tentang imperialisme memang dimulai oleh Lenin, tetapi kemudian muncul teori-teori yang merupakan variasi lain dari teori yang dicetuskan Lenin. Jelas, teori Marxis semuanya tergolong pada

kelompok teori di mana kepentingan ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya imperialisme.

3. Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme.

Seperti dikatakan sebelumnya, Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara pra kapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang seperti negara-negara kapitalis di Eropa, Baran berpendapat lain. Baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara pra kapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Pandangan atau teori Baran ini dituangkan dalam bukunya yang terkenal, *The Political Economy of Growth*, sebuah studi tentang dampak kolonialisme di India yang diterbitkan pada tahun 1957. Dengan pendapatnya ini, berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran (meminjam istilah Prebisch) berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalis seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit ini tetap kerdil dan tidak bisa besar. Mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat dulu? Menurut Baran, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga syarat: (a) meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan; (b) meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta; dan (c) mengumpulnya harta di tangan pedagang dan tuan tanah.

Faktor ketiga itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan pedagang dan tuan tanah kemudian diinvestasikan ke bidang industri. Sementara yang terjadi

di negara-negara pinggiran justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia barat ke negara-negara dunia ketiga membuat surplus. Surplus tersebut diambil oleh kaum pendatang. Jadi bukan akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Bagaimana proses penyusutan modal di negara-negara dunia ketiga ini terjadi ? Baran menjelaskan dengan melihat sifat kelas dan pemerintah yang berkuasa di negara-negara dunia ketiga. Di negara-negara ini terdapat macam-macam kelas di masyarakatnya. Pertama, adanya kelas tuan tanah yang kaya di pedesaan. Tuan tanah ini juga merupakan produsen dari hasil-hasil pertanian yang kemudian diekspor. Kedua, terdapat kelas pedagang. Mula-mula kegiatan mereka terbatas di dalam negeri saja. Dengan masuknya kekuatan asing, mereka kemudian berhubungan dengan orang-orang asing ini. Ketiga adanya kaum industrialis yang memproduksi komoditi-komoditi industri. Keempat, orang asing dengan modalnya yang kuat merupakan komponen yang baru dalam dunia perekonomian negara ini. Orang asing ini datang terutama terutama untuk mencari bahan mentah yang murah untuk dibawa pulang, mencari buruh murah untuk bekerja di pabrik-pabrik yang mereka dirikan, dan (kalau negara induknya sudah merupakan negara industri maju) menjual barang-barang industri mereka. Masuknya modal asing ini menimbulkan guncangan-guncangan baru terhadap kemapanan yang sudah ada.

Teori sistem dunia: Immanuel Wellerstein. Munculnya Wellerstein dengan teori sistem dunia juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keeterbelakangan. Teori sistem dunia Wellerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem mini yang terpisah. Kemudian

terjadi penggabungan-penggabungan baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia atau *world empire*. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sistem politik yang dipusatkan. Meskipun kerajaan dunia ini sangat besar, kawasannya terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasaan juga tidak dalam bentuk pengendalian yang ketat, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takhluk. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut. Perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik, sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Sejumlah kerajaan besar muncul dan menghilang, sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia. Kata Brewer, sebuah sistem dunia tidaklah harus berarti bahwa dia menguasai seluruh dunia. Sistem ini dirumuskan sebagai sebuah unit dengan satu pembagian kerja dengan macam-macam sistem budaya. Sistem dunia dengan demikian merupakan sebuah sistem dunia tanpa satu kekuasaan pusat. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein kemudian membagi tiga kelompok negara: pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Konsep ini jelas diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambah kelompok setengah pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas, yang paling kuat adalah negara-negara pusat. Kelompok negara-negara kuat yakni negara-negara kuat yakni negara-negara pusat mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya negara tengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling

dieksploitir. Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan negara kebangsaan, dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan-akan mereka berdiri sendiri. Selanjutnya, menurut Wallerstein, negara-negara bisa naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran dan sebaliknya. Naik dan turunnya kelas negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pada suatu saat Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia. Akan tetapi kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah negara-negara Eropa hancur dalam Perang Dunia II. Akan tetapi, pada saat ini muncul Jepang sebagai negara yang menantang kekuasaan hegemonik Amerika Serikat. Bangun dan jatuhnya kekuatan negara-negara ini oleh Wallerstein dijelaskan melalui sebuah analisis sistem dunia yang dituangkan dalam dua bukunya. Selain itu teorinya dapat digunakan untuk menjelaskan naiknya negara-negara industri (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura) dari posisinya pinggiran. Naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini memberikan kesempatan kepada beberapa negara yang sudah siap (kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya) untuk mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana. Industri dengan teknologi canggih yang memberi keuntungan besar seperti komputer, tetap ada di tengah negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura ini naik kelas. Wallerstein kemudian merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini:

1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali, dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk mulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri.

Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain, tetapi dalam kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara tengah pinggiran.

2. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena macam-macam alasan. Analisis Peter Evan tentang lahirnya pembangunan dalam ketergantungan. Akibat dari perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi setengah pinggiran.
3. Kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Wallerstein menunjuk Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep ujamaa untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju. Kalau berhasil, tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Akan tetapi, semua ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah ada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Kalau tidak tentu saja usaha ini bisa gagal.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Batang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja didasarkan atas kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batang. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa proyek-proyek strategis nasional dalam hal ini PLTU dan jalan tol disinyalir berdampak secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Batang. Keberadaan jalan tol bahkan bisa berdampak mengurangi pendapatan para pelaku usaha kuliner dan jasa penginapan yang sudah lama menjalankan usahanya di sepanjang jalan reguler. Jika pendapatan para pelaku usaha tersebut menurun, maka pada gilirannya juga akan menurunkan PAD Kabupaten Batang khususnya dari pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu, menganalisis dampak sosial ekonomi proyek-proyek strategis nasional bagi masyarakat Batang menjadi urgen dilakukan.

2. Sasaran Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola sumber-sumber PAD
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola urusan transportasi
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola urusan ketenagakerjaan
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola urusan pemberdayaan masyarakat
5. Pelaku usaha kuliner dan jasa penginapan
6. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
7. Tokoh masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap keberadaan proyek-proyek nasional di Kabupaten Batang
8. Masyarakat terdampak

9. Pengelola PLTU

10. Pengelola Jalan Tol

3. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menghitung dampak ekonomi proyek-proyek nasional strategis di Kabupaten Batang.
2. Metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperdalam serta menganalisis data dan informasi yang bersifat kualitatif yang diberikan oleh informan terutama berkaitan dengan dampak sosial proyek-proyek strategis nasional bagi masyarakat Kabupaten Batang.

4. Fokus Penelitian

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian, penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu. Tanpa fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperolehnya dari lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Dampak sosial dan ekonomi proyek PLTU bagi masyarakat Kabupaten Batang
2. Dampak sosial dan ekonomi proyek jalan tol bagi masyarakat Kabupaten Batang

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, peraturan perundangan, arsip dan berbagai laporan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini terutama ditujukan untuk mendapatkan data sekunder tentang potensi pajak hotel dan pajak restoran dan pendapatan masyarakat terdampak.

2. **Observasi.** Observasi dilakukan untuk mengamati dinamika sosial bagi masyarakat terdampak baik dari proyek PLTU maupun jalan tol serta mengamati kondisi dan seting sosial masyarakat terdampak proyek-proyek tersebut di Kabupaten Batang.
3. **Wawancara mendalam (*in-depth interview*).** Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data yang bersifat kualitatif yakni data tentang situasi sosial terutama situasi sosial masyarakat terdampak baik dari proyek PLTU maupun jalan tol.

7. Validitas Data

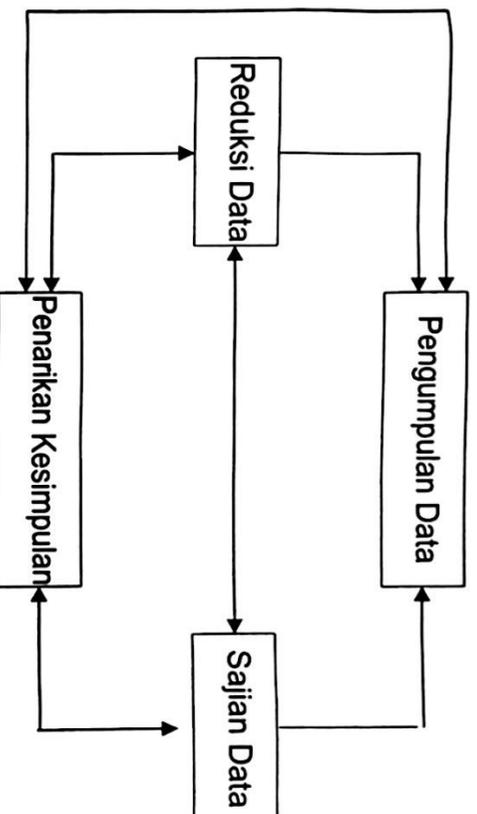
Dalam penelitian ini meskipun ada dua macam data yakni kualitatif dan kuantitatif, namun data kuantitatif merupakan hasil dokumentasi dan observasi, oleh karena itu teknik validitas data hanya digunakan satu teknik yaitu triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan teknik yang melakukan pengecekan dan pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil observasi, data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara, data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

8. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk menganalisis kedua macam data tersebut akan digunakan tiga macam teknik yakni:

1. **Teknik kuantitatif,** yakni untuk menghitung dampak ekonomi proyek-proyek strategis nasional bagi masyarakat Kabupaten Batang.
2. **Model analisis interaktif.** Dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam bentuk sajian data, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan para *interviewer* mungkin sangat banyak dan tidak semuanya relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan. Langkah-langkah ini dilakukan berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan apabila telah terjadi pengulangan dari data yang diperoleh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, proses analisis dengan model interaktif ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Miles dan Huberman (1984:120)

Menurut Miles dan Huberman (1984:120), tiga komponen tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam *fieldnote*, berlangsung terus selama pelaksanaan riset dimulai sebelum pengumpulan data dilakukan.
- b. Sajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Peneliti akan tahu apa yang terjadi dan memungkinkan sesuatu untuk dikerjakan berdasarkan pengertian tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah peneliti harus mengerti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 6 (enam) bulan. Secara rinci tahapan kegiatan berdasarkan waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

| Jenis Kegiatan | Bulan ke | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|-----|----|---|----|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| Keg Administratif | √ | | | | | |
| Penyusunan Instrumen Penelitian | √ | | | | | |
| Laporan Pendahuluan | | √ | | | | |
| Pengumpulan Data | | √ | √ | | | |
| Analisis Data | | | √ | √ | | |
| Laporan Antara | | | | √ | | |
| Penyusunan Laporan | | | | √ | √ | |
| Laporan Akhir | | | | | √ | √ |

10. Organisasi dan Personalia

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pelaksanaan kegiatan akan melibatkan tim, baik tim ahli maupun administratif dan tenaga lapangan.

11. Biaya Kegiatan

Kegiatan ini membutuhkan biaya kurang lebih Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.